PERATURAN DESA DUREN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes) TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA DUREN

Jl. Ngadipono No. 06 Desa Duren – Kode Pos 64475

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA DUREN

Pernin

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat". Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023		1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023		I-1
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum	I-2
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
	1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	I-3
BAB II	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	II-1
	2.1. Kebijakan Pendapatan Desa	II-1
	2.2. Kebijakan Belanja Desa	II-2
	2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa	II-3
BAB III	EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA	III-1
	3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022	III-1
	3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022	III-4
	3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022	III-8
	3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022	III-10
	3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022	III-12
	3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022	III-14
BAB IV	PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	IV-1
	4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023	IV-1
	4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023	IV-3
BAB V	PENUTUP	V

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA DUREN

PERATURAN DESA DUREN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUREN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Duren Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duren Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Duren Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUREN
dan
KEPALA DESA DUREN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Duren.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Duren dibantu Perangkat Desa Duren sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Duren.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Duren.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Duren.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Duren untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
   - 1.1. Latar Belakang
   - 1.2. Dasar Hukum
   - 1.3. Maksud dan Tujuan
   - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dipindai dengan CamScanner

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
2.2. Kebijakan Belanja Desa
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dipindai dengan CamScanner

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Duren.

Ditetapkan di Duren
pada tanggal 22 September 2022

KEPALA DESA DUREN,

SUTAJI

Diundangkan di Duren
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA DUREN,

BAMBANG SUSIANTO

LEMBARAN DESA DUREN TAHUN 2022 NOMOR 3

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA DUREN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi

Dipindai dengan CamScanner

kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

Dipindai dengan CamScanner

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Duren Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duren Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Duren Tahun 2019 Nomor 3);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa

Dipindai dengan CamScanner

b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Duren ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Duren serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Dipindai dengan CamScanner

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 3.108.079.300,- (Tiga Miliar Seratus Delapan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.500.000	17.500.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0	0	
4.1.2.	Hasil Aset	17.500.000	17.500.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0	0	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	2.334.734.270	3.067.079.300	
4.2.1.	Dana Desa	1.799.040.000	1.800.500.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	56.146.270	46.031.300	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	479.548.000	670.548.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		300.000.000	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	0	250.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.341.409	23.500.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	0	0	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	20.000.000	0	
4.3.6.	Bunga Bank	0	0	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0	30.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.801.679.409	3.108.079.300	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Duren sebesar Rp. 3.108.079.300,- (Tiga Miliar Seratus Delapan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
5.1.1	Kegiatan penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa	575.000.000	732.008.750	
5.1.2	Kegiatan penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa	67.072.100	99.000.000	
5.1.3	Kegiatan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	12.979.900	24.980.000	
5.1.4	Kegiatan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	106.770.600	62.800.000	
5.1.5	Kegiatan sub bidang pertanahan	70.000.000	56.110.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
5.2.1	Kegiatan sub bidang pendidikan	176.803.000	204.200.000	
5.2.2	Kegiatan sub bidang kesehatan	575.757.200	508.352.400	
5.2.3	Kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	318.425.900	676.828.150	
5.2.4	Kegiatan sub bidang kawasan pemukiman	200.000.000	96.000.000	
5.2.5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	10.000.000	
5.2.6	Kegiatan sub bidang pehubungan, komunikasi dan informatika	35.500.000	15.500.000	
5.2.8	Kegiatan sub bidang pariwisata	50.000.000	270.000.000	
5.3	Bidang Pembinaan			

Dipindai dengan CamScanner

	Kemasyarakatan Desa			
5.3.1	Kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	58.486400	47.200.000	
5.3.2	Kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan	13.545.000	5.000.000	
5.3.3	Kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga	20.000.000	28.000.000	
5.3.4	Kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat	30.739.200	61.900.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.1	Kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan	50.000.000	12.800.000	
5.4.2	Kegiatan sub bidang dukungan penanaman modal	50.000.000	41.000.000	
5.4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0	27.000.000	
5.4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0	7.800.000	
5.4.5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0	2.800.000	
5.4.6	Dukungan Penanaman Modal	0	2.800.000	
5.4.7	Perdagangan dan Perindustrian	0	5.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
5.5.1	Kegiatan sub bidang penanggulangan bencana	10.000.000	50.000.000	
5.5.2	Kegiatan sub bidang keadaan darurat	0	25.000.000	
5.5.3	Kegiatan sub bidang keadaan mendesak	720.000.000	36.000.000	
	JUMLAH BELANJA	2.801.679.409	3.108.079.300	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Pembiayaan Desa Duren

Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	0	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000	100.000.000	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	50.000.000	100.000.000	

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0	0
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	339.729.600	332.448.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.507.550	29.644.200
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	93.668.000	71.770.700
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000	23.700.000
06	Penyediaan Operasional BPD	20.200.000	14.856.100
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	60.000.000	60.000.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.500.000	17.500.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	41.500.000	18.500.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0	0
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	0	0

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	0	0
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.800.000	0
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	4.000.000	0
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.400.000	0
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	15.780.000	4.133.300
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	0	0
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5.600.000	0
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	6.600.000	16.604.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	4.000.000	18.501.300
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.000.000	9.180.500
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.000.000	3.867.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	3.300.000	0
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.300.000	0
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000	7.750.000
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	0	0
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	0	0
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	4.000.000	0
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	0	0
91	Forum Pembina Desa	9.000.000	11.929.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	15.000.000	0
02	Administrasi Pertanahan	25.000.000	0
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	0	0
04	Mediasi Konflik Pertanahan	0	0
05	Penyuluhan Pertanahan	0	0
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.110.000	19.650.000
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	0	0
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	0

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 25 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 16 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 64 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	332.448.000	193.928.000	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.644.200	29.644.200	Tercapai
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	71.770.700	51.770.700	Belum Tercapai
4.	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000	13.700.000	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Operasional BPD	14.856.100	4.856.100	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	60.000.000	35.000.000	Belum Tercapai
7.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.500.000	0	Tidak
8.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	18.500.000	18.500.000	Tercapai
9.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.133.300	4.133.300	Tercapai
10.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	16.604.000	16.604.000	Tercapai
11.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	18.501.300	18.501.300	Tercapai
12.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	9.180.500	9.180.500	Tercapai
13.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Peni	3.867.000	3.867.000	Tercapai

Dipindai dengan CamScanner

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
	lnian Aset Desa			
14.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.750.000	7.750.000	Tercapai
15.	Forum Pembina Desa	11.929.000	11.929.000	Tercapai
16.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.650.000	19.650.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 10 kegiatan

b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	125.400.000	136.743.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	10.000.000	0
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	0	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	5.200.000	0
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	40.000.000	0
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	0	0
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	0	0
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	2.000.000	0
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0	0
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	21.600.000	0
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	12.000.000	5.855.100

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Penyelenggaraan Posyandu	169.852.400	164.739200
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	11.200.000	10.694.400
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	267.800.000	151.473.200
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	0	0
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.500.000	2.544.600
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	0	0
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	14.000.000	0
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	30.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	0	0
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	0	0
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0	0
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	0
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	0	0
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	0	0
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0	0
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	0	0
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	0	0
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	0	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	312.480.000	28.096.270
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	131.040.000	0
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	250.000.000	0
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	0	0
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	0	0
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0	0
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	0	0
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	0	0
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	0	0
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	0	0
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	0	0
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	0	0
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	0	0
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0	0
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	0	0
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0	0
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0	0
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	0	0
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	0	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	0	0
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	0	0
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	45.000.000	0
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	0	0
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0	0
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	15.000.000	0
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	0	
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	0	0
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	6.000.000	0
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		0
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	0	0
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	10.000.000	0
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	0	
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	5.500.000	0
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	0	0
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya		

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0	0
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	30.000.000	0
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	90.000.000	10.121.000
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	150.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 25 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 32%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	125.400.000	136.743.000	Tercapai
2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	12.000.000	5.855.100	Tercapai

Dipindai dengan CamScanner

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
3.	Penyelenggaraan Posyandu	169.852.400	164.739200	Tercapai
4.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	11.200.000	10.694.400	Tercapai
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	267.800.000	151.473.200	Tercapai
6.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.500.000	2.544.600	Tercapai
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	312.480.000	28.096.270	Belum
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	90.000.000	10.121.000	Belum

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 6 kegiatan

b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	10.000.000	0
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	22.200.000	7.179.200
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	0	0
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	10.000.000	14.000.000
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	0	0
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	0	0
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	5.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	0	0
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000	0

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	0
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	0	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	0	0
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	0
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	0	0
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	0	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	10.000.000	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	0	0
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	18.000.000	9.329.400
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	0	0
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	3.500.000	0
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17.200.000	10.299.900
03	Pembinaan PKK	26.700.000	26.539.300
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000	0
90	Pembinaan Karang Taruna	10.500.000	0
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 12 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 42%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dipindai dengan CamScanner

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	7.179.200	7.179.200	Tercapai
2.	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	14.000.000	14.000.000	Tercapai
3.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	9.329.400	9.329.400	Belum
4.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.299.900	9.299.900	Belum
5.	Pembinaan PKK	26.539.300	16.539.300	Belum

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan

b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

/

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	10.000.000	0
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi	2.800.000	0

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	6.000.000	0
02	Peningkatan Produksi Peternakan	0	0
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	0	0
04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	35.000.000	359.808.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	0	0
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.000.000	3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000	1.500.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000	1.500.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000	0
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	2.800.000	0
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	0	0
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	2.800.000	0
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa	0	0
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	2.800.000	4.500.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	0
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	2.800.000	0
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	0	0
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	5.000.000	0
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang	0	0

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 13 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 38%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Angaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	359.808.000	359.808.000	Tercapai
2.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	Tercapai
3.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.500.000	1.500.000	Tercapai
4.	Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000	1.500.000	Tercapai
5.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	4.500.000	4.500.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

Dipindai dengan CamScanner

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000	5.000.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	47.126.150	0
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000	720.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 67%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Angaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000	0	Belum
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	720.000.000	540.000.000	Belum

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan

b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan

Dipindai dengan CamScanner

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Duren sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   1. Dalam hal pengembangan sarana dan prasarana kantor desa tidak bisa dibiayai.
   2. Dalam kegiatan operasional pemerintahan desa anggaran kurang besar
B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
   1. Tidak ada kegiatan pembangunan fisik sama sekali
   2. Tidak bisa melaksanakan renovasi gedung PAUD dan Gedung Polindes yang sudah perlu perbaikan
C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
   1. Perlu adanya pembinaan administrasi lembaga desa
   2. Perlu adanya pembinaan kepemudaan dalam hal olah raga
D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
   1. Pemberdayaan perempuan dibidang olahan rumah kurang maksimal
   2. Belum maksimalnya peningkatan kapasitas perangkat desa dan lembaga desa
E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
   1. Perlu penambahan dana tak terduga

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Duren yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
      1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
      2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
      3) RKP Desa Tahun 2023
      4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
      5) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
   b. Penyelenggaraan kegaiatan dalam capaian target bidang pemerintahan desa tahun 2021
   c. Penyelenggaraan Administrasi, Pencatatan aset tetap, sarana dan prasarana pemerintahan desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
   a. Pembangunan dan peningkatan fasilitas umum
   b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan pendidikan
   c. Pembangunan dan peningkatan pelayanan kesehatan
   d. Pembangunan dan peningkatan pariwisata di desa
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
   a. Pembinaan kapasitas kepala desa dan perangkat desa

Dipindai dengan CamScanner

b. Peningkatan kapasitas BPD, Kepemudaan, PKK dan Kelembagaan Desa

c. Peningkatan kapasitas forum destana

4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Pemberdayaan perempuan

b. Pemberdayaan UMKM usaha produk rumahan

c. Pembinaan masyarakat dalam bidang pariwisata

5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Penanggulangan bencana alam dan penanganan pasca covid-19

b. Bantuan Langsung Tunai atau bantuan bahan sembako bagi masyarakat terdampak kebencanaan

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa :
   a. Data Kemiskinan
   b. EHDW
   c. Prodeskel
   d. Epdeskel
   e. IDM
   f. Sipades
   g. BDT
   h. SEDUDO
   i. SIPD
   j. SIMANIS Desa
   k. DDC Bumdesa
   l. SDGs
   m. Data Aset
3. Kegiatan gotong royong

Dipindai dengan CamScanner

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2023

DESA : DUREN
KECAMATAN : SAWAHAN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang			Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**															
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1	1	Januari s/d Desember	Desa Duren	12 org/bln	Kades	-				
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	12	12	Januari s/d Desember	Desa Duren	12 org/bln	Perangkat Desa	339.729.600	ADD	√		
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18											
				a. BPJS Kesehatan	1,2,3,18	12	14	Januari s/d Desember	Desa Duren	14 org/bln	Perangkat Desa	18.199.800	ADD	√		
				b. BPJS Ketenagakerjaan	1,2,3,18	12	14	Januari s/d Desember	Desa Duren	14 org/bln	Perangkat Desa	32.307.750	ADD	√		
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	1	1	Januari s/d Desember	Desa Duren	1 paket	Perangkat Desa	84.385.600	ADD	√		
				a. ATK	18	1	1	Januari s/d Desember	Desa Duren	1 paket	Pemdes	10.000.000	ADD	√		
				b. Honorarium PKPKD dan PPKD	18	7	7	Januari s/d Desember	Desa Duren	7 org/bln	Pemdes	45.000.000	ADD	√		
				c. Perlengkapan perkantoran	18	1	1	Januari s/d Desember	Desa Duren	1 Paket	Pemdes	40.000.000	ADD/DD	√		
				d. Pakaian dinas/atribut,	18	15	15	Januari s/d Desember	Desa Duren	15 org	Pemdes	8.500.000	ADD	√		
				e. Listrik/telpon	18	12	12	Januari s/d Desember	Desa Duren	12 bln	Pemdes	2.496.000	ADD	√		
				f. Internet	18	12	12	Januari s/d Desember	Desa Duren	12 bln	Pemdes	6.000.000	ADD	√		
				g. Bantuan Transport Pemdes	18	16	16	Januari s/d Desember	Desa Duren	16 org	Pemdes	8.640.000	ADD/DD	√		
				h. Bantuan Transport Kepala Desa	18	1	1	Januari s/d Desember	Desa Duren	1 org	Kades	4.800.000	ADD/DD	√		
				i. Biaya Rapat-rapat	18	1	1	Januari s/d Desember	Desa Duren	1 Paket	Pemdes	7.200.000	ADD/DD	√		
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	9	9	Januari s/d Desember	Desa Duren	9 org/bln	Anggota BPD	23.700.000	ADD	√		
			6	Penyediaan Operasional BPD	18											
				a. Biaya rapat-rapat	18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Anggota BPD	9.900.000	ADD	√		
				b. perlengkapan perkantoran	18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 Paket	Anggota BPD	4.950.000	ADD	√		

				e. pakaian dinas/atribut,	18	9	9	Januari s/d Desember	Duren	9 org	Anggota BPD	2.700.000	ADD	√		
				e. ATK	18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 Paket	Anggota BPD	6.000.000	ADD/DD	√		
			7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1,2,3,18	50	50	Januari s/d Desember	Duren	50 org/bln	RT/RW	60.000.000	ADD/DD	√		
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	13	13	Januari s/d Desember	Duren	13 org/bln	Perangkat Desa	17.500.000	PAD	√		
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9,18											
				a. Komputer, laptop	9,18	7	9	Januari s/d Desember	Duren	2 unit	Pemdes	18.000.000	ADD/DD	√		
				b. Printer	9,18	4	6	Januari s/d Desember	Duren	2 unit	Pemdes	6.500.000	ADD/DD	√		
				c. Kipas Angin	9,18	1	3	Januari s/d Desember	Duren	2 unit	Pemdes	3.000.000	ADD/DD	√		
				d. Kursi Kantor	9,18	4	6	Januari s/d Desember	Duren	10 unit	Pemdes	7.500.000	ADD/DD	√		
				e. Rak Arsip Dokumen	9,18	1	2	Januari s/d Desember	Duren	1 unit	Pemdes	5.000.000	ADD/DD	√		
				f. Meja Kantor	9,18	1	2	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	4.000.000	ADD/DD	√		
				g. Almari	9,18	1	2	Januari s/d Desember	Duren	1 unit	Pemdes	5.000.000	ADD/DD	√		
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	50.000.000	ADD/DD	√		
			3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18											
	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1,5,8,10											
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18											
				a. ATK dan Benda POS	1,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	1.000.000	ADD	√		
				b. Cetak/Penggandaan	1,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	500.000	ADD	√		
				c. Biaya Rapat-Rapat	1,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	1.000.000	ADD	√		
				d. Honor TIM dan Narasumber	1,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 org	Pemdes	300.000	ADD	√		
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18											
				a. ATK dan Benda POS	18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	2.500.000	ADD	√		
				b. Cetak/Penggandaan	18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	500.000	ADD	√		
				c. Biaya Rapat-Rapat	18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	1.000.000	ADD	√		
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10,16											
				a. ATK dan Benda POS	10,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	1.000.000	ADD	√		
				b. Cetak/Penggandaan	10,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	400.000	ADD	√		
				c. Biaya Rapat-Rapat	10,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	1.000.000	ADD	√		

			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10										
				a. ATK dan Benda POS	1,5,8,10	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	300.000	ADD/DD	√	
				b. Cetak/Penggandaan	1,5,8,10	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	400.000	ADD/DD	√	
				c. Biaya Rapat-Rapat	1,5,8,10	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	1.700.000	ADD/DD	√	
				d. Honor TIM dan Narasumber	1,5,8,10	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 org	Pemdes	2.880.000	ADD/DD	√	
				e. Bantuan Transport Tim dan Narasumber	1,5,8,10	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 org	Pemdes	500.000	ADD/DD	√	
				f. Bantuan Sosial Masyarakat Miskin	1,5,8,10										
				g. Bantuan Anak Yatim	1,5,8,10	10	10	Januari s/d Desember	Duren	10 org	Anak Yatim	10.000.000	DD	√	
			90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan											
	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,10,17,18										
				a. Musyawarah Desa	5,10,17,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	BPD	2.800.000	DD	√	
				b. Musrenbang Desa	5,10,17,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	2.800.000	DD	√	
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17,18										
				a. Musyawarah Dusun	5,10,17,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 Paket	BPD	3.000.000	DD	√	
				b. Rembug Desa	5,10,17,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 Paket	Pemdes	3.600.000	DD	√	
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17,18										
				a. RPJM Desa	5,10,17,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	2.800.000	DD	√	
				b. RKP Desa	5,10,17,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	1.200.000	DD	√	
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17,18										
				a. APB Desa / APB Desa Perubahan	5,10,17,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	3.000.000	DD	√	
				b. LPJ APB Desa	5,10,17,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	3.000.000	DD	√	
			5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5,10,17,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	3.000.000	DD	√	
			6	Penyusunan Kebijakan Desa	5,10,17,18										
				a. Penyusunan Perdes/Perkades	5,10,17,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	3.300.000	DD	√	
			7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	3.300.000	ADD/DD	√	

				laporan akhir tahun anggaran,, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	16,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	3.000.000	DD	√		
			8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	15.000.000	DD	√		
			11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	4.000.000	DD	√		
			01	Forum Pembina Desa	11,16,17,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	9.000.000	ADD	√		
	5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	1	2	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	15.000.000	DD	√		
			2	Administrasi Pertanahan	18	0	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	25.000.000	DD	√		
			5	Penyuluhan Pertanahan	10,16											
			6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	16.110.000	PBH	√		
					Jumlah Bidang 1							**974.898.750**				
2	**Pelaksanaan Pembangunan Desa**															
	1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,9,10											
				a. Honor Pengajar	4,9,10	15	15	Januari s/d Desember	Duren	15 org/bln	Guru TPA	24.000.000	DD	√		
				b. Honor Guru Madrasah Diniyah	4,9,10	21	23	Januari s/d Desember	Duren	23 org/bln	Guru Madin	18.000.000	DD	√		
				c. Honor Guru TK/PAUD	4,9,10	14	14	Januari s/d Desember	Duren	14 org/bln	Guru TK dan PAUD	78.000.000	DD			
				d Bantuan Operasional	4,9,10	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Lembaga TK, PAUD, dan Madin	5.400.000	DD	√		
			2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,5,10	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Lembaga TK dan PAUD	10.000.000	DD	√		
				a. Pelatihan peningkatan kapasitas guru TK dan PAUD	4,5,10	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Guru TK dan PAUD	5.200.000	DD	√		
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	4,9,10	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Lembaga TK dan PAUD	40.000.000	DD	√		
				a. Pengadaan buku perpustakaan	4,9	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	2.000.000	DD	√		
				a. Bantuan Transport Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus	1,4	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	anak berkebutuhan khusus	21.600.000	DD	√		
	2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,10,11,16											
				a. Pengadaan Obat dan Vitamin	3,10,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	12.000.000	DD	√		
			2	Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,16											
				a. PMT Anak	3,10,11,16	477	477	Januari s/d Desember	Duren	477 org/bln	Masyarakat	54.600.000	DD	√		

				b. PMT Ibu Hamil	3,10,11,16	54	54	Januari s/d Desember	Duren	54 org/bln	Masyarakat	25.308.000	DD	√		
				c. PMT Lansia	3,10,11,16	135	135	Januari s/d Desember	Duren	135 org/bln	Masyarakat	17.400.000	DD	√		
				d. Insentif Kader Posyandu	3,10,11,16	54	54	Januari s/d Desember	Duren	54 org/bln	Kader Posyandu	62.400.000	DD	√		
				e. Penanganan Stunting	3,10,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	10.144.400	DD	√		
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3,10,6,11,16											
				a. Penyuluhan Gizi Buruk	3,10,6,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	kader kesehatan	2.800.000	DD	√		
				b. Penyuluhan Stunting	3,10,6,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	kader kesehatan	2.800.000	DD	√		
				c. Penyuluhan Demam Bedarah	3,10,6,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	kader kesehatan	2.800.000	DD	√		
				d. Pelatihan Kader Kesehatan	3,10,6,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	kader kesehatan	2.800.000	DD	√		
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,6,10,11,16											
				a. Bantuan Transport Kader Desa Siaga	3,6,10,11,16	7	7	Januari s/d Desember	Duren	7 org/bln	kader desa siaga	6.300.000	DD	√		
				b. Bantuan Transportasi Pendampingan Gerdaristi	3,6,10,11,16	3	3	Januari s/d Desember	Duren	3 org/bln	kader desa siaga	3.000.000	DD	√		
				c. Bantuan Transportasi Kader Pembangunan Manusia	3,6,10,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 org/bln	Kader KPM	1.800.000	DD	√		
				d. Honorarium operator EDMC	3,6,10,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 org/bln	Operator EDMC	1.800.000	DD	√		
				e. Honor Sopir Mobil Desa Siaga	3,6,10,11,16	0	1	Januari s/d Desember	Duren	1 org/bln	Pemdes	2.400.000	DD	√		
				f. Oprasional Mobil Desa Siaga	3,6,10,11,16	0	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	20.000.000	DD	√		
				g. Perawatan Mobil Desa Siaga	3,6,10,11,16	0	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pemdes	2.500.000	DD	√		
				h. Pengadaan Mobil Desa Siaga	3,6,10,11,16	0	1	Januari s/d Desember	Duren	1 unit	Masyarakat	230.000.000	PBK	√		
				a. Insentif Petugas	3,6,10,11,16	5	5	Januari s/d Desember	Duren	5 org/bln	Kader BKB	3.500.000	DD	√		
			8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,6,10,11,16											
				a. Posyandu	3,6,10,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	8.000.000	DD	√		
				b. Polindes	3,6,10,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	6.000.000	DD	√		
			9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,9											
				a. Rehab Ruang Polindes	3,9	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	30.000.000	DD	√		
			90	Kegatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa												
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan	1	Pemeliharaan Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15											
			10	Pembangunan / Peningkatan Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15											

				a. Pavingisasi Jalan RT. 04 RW. 02 Lingkar SD - Polindes	3,5,8,9,10,11,15	750 m	750 m	Januari s/d Desember	Bomo RW 2	300 x 2,5 m	Masyarakat	151.200.000	DD	√		
				b. Pavingisasi Jalan Lingkungan RW. 3	3,5,8,9,10,11,15	800 m	800 m	Januari s/d Desember	Sugihan Rt 1 Rw 2	400 x 2 m	Masyarakat	53.308.150	DD	√		
			11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,5,8,9,10,11,15											
				a. Pavingisasi Jalan Gang (Rt 01 Rw 02)	3,5,8,9,10,11,15	125 m	125 m	Januari s/d Desember	Bomo Rt 4 Rw 2	50 x 2,5 m	Masyarakat	25.200.000	DD	√		
				b. Pavingisasi Jalan Dalam Makam	3,5,8,9,10,11,15	225 m	225 m	Januari s/d Desember	Makam Sugihan	150 x 1,5 m	Masyarakat	45.360.000	DD	√		
				c. Pavingisasi Jalan Gang Ampelgading	3,5,8,9,10,11,15	300 m	300 m	Januari s/d Desember	Ampelgading	150 x 2 m	Masyarakat	60.480.000	DD	√		
			12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,10,11,15											
				a. TPT Jalan Tembus (Rt 1 Rw 2 - Jalan barat makam)	3,5,8,9,10,11,15	150 m	150 m	Januari s/d Desember	Bomo	150 x 1 m	Masyarakat	161.280.000	DD	√		
				b. TPT Jalan Usaha Tani (AG utara)	3,5,8,9,10,11,15	80 m	80 m	Januari s/d Desember	Ampelgading	40 x 2 m	Masyarakat	85.000.000	DD	√		
				c. TPT Jalan Lingkungan RW. 2	3,5,8,9,10,11,15	150 m	150 m	Januari s/d Desember	Ampelgading	60 x 2,5 m	Masyarakat	95.000.000	DD	√		
	4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	1,3,10,11,16	6	2	Januari s/d Desember	duren	2 paket	Masyarakat	30.000.000	DD	√		
			12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	3,6,9,11,13,15											
				a. Pipanisasi sambungan air bersih	3,6,9,11,13,15	1	1	Januari s/d Desember	Jatirejo	1 paket	Masyarakat	45.000.000	DD	√		
			15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	3,6,9,11,13,15	10	3	Januari s/d Desember	Duren	3 paket	Masyarakat	15.000.000	DD	√		
			18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	3,6,9,11,13,15	1	3	Januari s/d Desember	Duren	3 paket	Masyarakat	6.000.000	DD	√		
	5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	8,9,13,15											
			2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1,5,8,9,13,15	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	10.000.000	DD	√		
	6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	11,15											
			2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	9,18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	5.500.000	DD	√		
			3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4,8,9	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	10.000.000	DD	√		
	8	Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	8,9	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	30.000.000	DD	√		
			2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	8,9	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	90.000.000	PBK	√		
			3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8,9	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	150.000.000	DD	√		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata								-				
					Jumlah Bidang 2							**1.780.550.550**				
3	**Pembinaan Kemasyarakatan Desa**															

	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11											
				a. Pembangunan Pos Kamling	11	3	5	Januari s/d Desember	duren	2 paket	Masyarakat	10.000.000	DD	√		
			2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,11,17											
				a. Honor Anggota Linmas	4,11,17	38	38	Januari s/d Desember	duren	38 org/bln	Linmas	22.200.000	DD	√		
			4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,17											
				a. Pelatihan peningkatan kapasitas relawan destana	4,11,17	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Relawan Destana	10.000.000	DD	√		
			7	Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	4,1	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	5.000.000	DD	√		
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4,16,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	5.000.000	DD	√		
	3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	4,18											
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	4,18	3	3	Januari s/d Desember	duren	3 paket	pemuda	10.000.000	DD	√		
			6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	4,18											
				a. Pembinaan klub bola voily tingkat desa	4,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	pemuda	10.000.000	DD	√		
				b. Pembinaan sub karang taruna	4,18	8	8	Januari s/d Desember	duren	8 paket	pemuda	8.000.000	DD	√		
	4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	4,5,18											
				a. Pembinaan pengurus jenazah		1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	pengurus jenazah	3.500.000	DD	√		
			2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,5,18											
				a. Penyuluhan keanggotaan LPMD	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga LPMD	1.500.000	DD	√		
				b. Honorarium ketua LPMD	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 org/bln	Lembaga LPMD	1.200.000	DD	√		
				c. Operasional LPMD	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga LPMD	4.500.000	DD	√		
				d. Penyuluhan Keanggotaan KPMD	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga KPMD	1.000.000	DD	√		
				e. Honor anggota KPMD	4,5,18	5	5	Januari s/d Desember	duren	5 org/bln	Lembaga KPMD	4.500.000	DD	√		
				f. Operasional KPMD	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga KPMD	4.500.000	DD	√		
			3	Pembinaan PKK	4,5,18											
				a. Honorarium ketua PKK	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 org/bln	Lembaga PKK	1.200.000	DD	√		

				b. Operasional PKK	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga PKK	12.000.000	DD	√		
				c. Belanja Modal PKK	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga PKK	8.000.000	DD	√		
				d. Penyuluhan Keanggotaan PKK	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga PKK	5.500.000	DD	√		
			4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4,5,18											
				a. Pelatihan pembinaan lembaga daur ulang sampah	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	2.800.000	DD	√		
				b. Pelatihan pembinaan lembaga pengelolaan hasil pertanian/perkebunan	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	1.200.000	DD	√		
			90	Pembinaan Karang Taruna	4,5,18			Januari s/d Desember								
				a. Honorarium Ketua Karang Taruna	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 org/bln	Lembaga Karang Taruna	1.200.000	DD	√		
				b. Operasional Karang Taruna	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga Karang Taruna	6.000.000	DD	√		
				c. Belanja Modal Karang Taruna	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga Karang Taruna	1.500.000	DD	√		
				d. Penyuluhan Keanggotaan Karang Taruna	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga Karang Taruna	1.800.000	DD	√		
			91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat												
Jumlah Bidang 3												**142.100.000**				
4	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**															
	1	Kelautan dan Perikanan	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	8,12,15											
			5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	8,12,15	74	37	Januari s/d Desember	duren	37 paket	Masyarakat	10.000.000	DD	√		
			6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	8,12,15	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	2.800.000	DD	√		
	2	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,2,3,5,8,12	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	6.000.000	DD	√		
			4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3,8,9,12,15											
				a. Pemeliharaan saluran irigasi tersier	3,8,9,12,15	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	35.000.000	DD	√		
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,5,17,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Kepala Desa	6.000.000	DD	√		
			2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Perangkat Desa	12.000.000	DD	√		
			3	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Anggota BPD	9.000.000	DD	√		
	4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1,4,5,8,10	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Kader Kesehatan, KPM, dan KPMD	5.000.000	DD	√		

			2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	1,4,5,8,10	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Kader Kesehatan, KPM, dan KPMD	2.800.000	DD	√		
	5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	1,3,4,5,8,10											
				a. Pelatihan Kewirausahaan	1,3,4,5,8,10	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	2.800.000	DD	√		
	6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa	1,3,4,5,8,10											
			2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1,3,4,5,8,10											
				a. Pelatihan Administrasi BUMDes dan Manajemen Pengelolaan	1,3,4,5,8,10	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Pengurus BUMDesa	2.800.000	DD	√		
	7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	1,3,4,5,8,9,10, 12											
			3	Pengembangan Industri kecil level Desa	1,3,4,5,8,9,10, 12											
				a. Pelatihan pembuatan oleh-oleh khas desa	1,3,4,5,8,9,10, 12	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Pengurus BUMDes dan Masyarakat	5.000.000	DD	√		
Jumlah Bidang 4												**99.200.000**				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa															
	1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5,9,15	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	50.000.000	DD	√		
	2	Keadaan Darurat	00	Keadaan Darurat	1,2,3,4,5,9,15	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	25.000.000	DD	√		
	3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak	1,2,3,4,5,9,15	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	36.000.000	DD	√		
Jumlah Bidang 5												**111.000.000**				
JUMLAH TOTAL												**3.108.079.300**				

Mengetahui :
Kepala Desa,

KEPALA DESA
DUREN (SUTAN)

Duren, Tanggal 22 September 2022
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

(SUBANG SUBIANTO)

BAB V
PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA DUREN,

KEPALA DESA DUREN

SUTAJI

Dipindai dengan CamScanner